



WFM

V A L U E F O R M O N E Y

MEDIA INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

BARU DIBENTUK, DITJEN PEMBIAYAAN LANGSUNG KEBUT KERJA

MARI MENGENAL
SOSOK EKO D
HERIPOERWANTO

PEMBANGUNAN
RUSUN AKAN
MENGUNAKAN
SKEMA KPBU

MENULUSURI
KAMPUNG WARNA
WARNI DAN
MUSEUM ANGKUT



9 772549 619111

LAPORAN UTAMA



10

3 DARI REDAKSI

4 LIPUTAN

- Pembangunan Rusun Akan Menggunakan Skema KPBU
- Unit Kerja Baru Diyakini Akan Tingkatkan Kinerja Penyediaan Infrastruktur
- PKO dengan Bank NTB Syariah untuk Satu Juta Rumah

8 SINERGI KPBU

Menengok Progres Tol Serang-Panimbang

10 LAPORAN UTAMA

Baru Dibentuk, DJPI Langsung Kebut Kerja

16 TOKOH

Mengenal Eko D Heripoerwanto, Nakhoda Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

20 OPINI

DJPI Bisa Begerak Cepat Tangani Proyek Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

24 JELAJAH

Menelusuri Kampung Warna Warni dan Museum Angkut

28 TANYA PEMBIAYAAN

- Subsidi Bunga Kredit Perumahan
- Perbedaan Manfaat Program FLPP dan SSB untuk MBR
- Apa Itu KPBU

30 LAYAR PEMBIAYAAN

34 KUIS



"KAMI BERUBAH"

Bergerak dan berubah menuju ke arah yang lebih baik adalah komitmen kami. Seperti majalah yang Anda pegang saat ini, dulunya bernama GRHA, kini berganti nama menjadi *Value for Money* (VfM). Perubahan ini tentu bukan tanpa alasan. Direktorat Jenderal tempat Majalah GRHA bernaung bernama Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan telah berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atau disebut DJPI.

Perubahan ini meliputi fungsi-fungsi organisasi agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dan terintegrasi. Tentunya, semangat inilah yang kami petik di Majalah terbaru VfM. Banyak hal baru yang ada di dalam Majalah VfM ini, salah satunya adalah rubrik *Tokoh* dan *Layar Pembiayaan*. Di rubrik *Tokoh* di edisi

ini, kami mengulas tentang sosok pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Kami menulis tentang Dr. Ir. Eko D Heripoerwanto, MCP, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Sedangkan di *Layar Pembiayaan* kami juga mempublikasi foto-foto kegiatan selama beberapa bulan terakhir. Tak sampai di situ, DJPI juga menghadirkan kuis dengan hadiah menarik untuk para pembaca.

Tampilan baru juga bisa Anda lihat dari awal hingga akhir halaman. Semangat perubahan ini semata-mata kami lakukan untuk para pembaca setia kami.

Selamat menikmati!

VfM

VALUE FOR MONEY

PELINDUNG

Dr. Ir. Eko D Heripoerwanto, MCP

PENASIHAT

Ir. Irma Yanti, MT

PENGARAH

Ir. Herry Trisaputra Zuna, SE, MT
 Ir. Arvi Argyantoro, MA
 Reni Ahiantini, ST, M.Sc
 Adang Sutara, SE, M.Si
 R. Haryo Bakti Martoyoedo, ST, M.Sc

PEMIMPIN REDAKSI

Dedy S Budisusetyo, SH, MT

REDAKTUR PELAKSANA

Indah Pratiwi, S.Sos, M.Si

REDAKSI

Fenty Meilisa Syafril, S.Sos, M.Si

EDITOR

Anggoro Widayastika, SH, MH,
 Putrawan, SH

DESAINER

Fahmi Nurhuda, Michael Adha

FOTOGRAFER

Komarudin, Dwi Cristianto

REPORTER

Medika Yogi P, S.I. Kom
 Riyan Aditya P, S.I. Kom

SEKRETARIAT DAN SIRKULASI

Shara Vadya, S.I. Kom
 Rubi Esti Aprilia, SH, MH
 Dony Triastomo,
 Yudistira Adinugroho, SH

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
 Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Kementerian Pekerjaan Umum dan
 Perumahan Rakyat
 Jalan Raden Patah 1 No. 1, Kebayoran Baru,
 Jakarta Selatan 12110
 Telepon/Fax: (021) 7200793
 Email: redaksigrha@gmail.com

DITERBITKAN OLEH

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan
 Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Kementerian Pekerjaan Umum dan
 Perumahan Rakyat

pembiayaan.pu.go.id

 PembiayaanInfrastruktur

 @Pembiayaan_Infrastruktur

 Pembiayaan Infrastruktur PUPR

 @Pemb_InfraPUPR



KETERLIBATAN SWASTA TERUS DIDORONG MELALUI BERBAGAI MODEL KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPB) ATAU PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.

PEMBANGUNAN RUSUN AKAN MENGGUNAKAN SKEMA KPB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dengan keterbatasan anggaran Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penyediaan infrastruktur, maka diperlukan inovasi pembiayaan non-APBN, salah satunya melalui skema KPB.

“Pembiayaan kreatif diperlukan untuk penyelenggaraan infrastruktur ke depan. Untuk itu Kementerian PUPR membentuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) yang tugasnya fokus pada pengembangan model pembiayaan non APBN seperti Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) atau KPB,” ujar Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto mengatakan saat ini pembangunan infrastruktur PUPR dengan skema KPB,

tidak hanya dalam pembangunan jalan tol dan sistem penyediaan air minum (SPAM), ke depan akan dijangkau peluang KPB dalam pembangunan Rumah Susun (Rusun).

Dirjen PI menambahkan, untuk menyiapkan penerapan KPB bidang perumahan, perlu ada pelibatan kontraktor dan/atau pengembang yang sekaligus akan menjadi investor sejak awal. Mulai dari tahap awal pembuatan desain, pembangunan hingga pengelolaan dengan diberikan masa konsesi dalam jangka waktu tertentu. “Ini merupakan model bisnis baru, untuk itu perlu dibicarakan juga dengan para pengembang yang nantinya dapat sekaligus menjadi investor,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Herry Trisaputra Zuna, yang akrab disapa Herry TZ, sebagai narasumber dalam *mini talkshow* mengatakan KPB untuk pembangunan Rusun sangat dimungkinkan karena kebutuhannya yang besar dan merupakan kebutuhan

dasar. Manfaat dari KPB akan meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan Rusun sehingga pasokan hunian terjangkau lebih banyak dan orientasi pada pelayanan serta *value for money* yang lebih baik.

Menurut Herry TZ dari Rp 2.058 triliun kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Kementerian PUPR hingga tahun 2030, namun hanya Rp 623 triliun atau 41 persen saja yang dianggarkan dari APBN.

Presiden Direktur PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) Armand Hermawan yang juga menjadi narasumber mengatakan skema KPB untuk pembangunan rusun sangat dimungkinkan untuk pembangunan rusun yang berskema sewa atau Rusunawa. “Kalau untuk rusunawa itu sesuai dengan ketentuan KPB, yakni pendanaan, pembangunan lalu diberikan hak konsesi. Setelah habis masa konsesi akan dikembalikan ke Pemerintah. Untuk Rusun Hak Milik (Rusunami) yang setelah dibangun akan langsung diambil oleh pengguna, mekanismenya perlu dikaji lebih lanjut dengan DJPI,” ujar Armand.



UNIT ORGANISASI BARU DIYAKINI AKAN TINGKATKAN KINERJA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

**PENGUATAN ORGANISASI
KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
(PUPR) DI ANTARANYA
DIBENTUK DIREKTORAT
JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN (DJPI).**

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, DJPI merupakan pengembangan dari Ditjen Pembiayaan Perumahan yang sebelumnya hanya fokus pada pengembangan inovasi pembiayaan kreatif di bidang perumahan. Inovasi sumber pembiayaan non APBN turut mempercepat ketersediaan in-

frastruktur sebagai alternatif APBN yang terbatas.

"Tugasnya fokus pada pengembangan model pembiayaan non APBN seperti Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUs). Pembiayaan ini harus kreatif untuk penyelenggaraan infrastruktur ke depan," katanya.

Selain itu, untuk melaksanakan tugas tambahan rehabilitasi dan membangun prasarana dan sarana pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga PTN/PTS yang rusak atau belum diselesaikan pada waktu sebelumnya, Kementerian PUPR juga membentuk Pusat Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar yang berada di bawah Ditjen Cipta Karya.

Di bawah Sekretariat Jenderal juga dibentuk unit kerja baru

yakni Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah yang ditugasi untuk menyelenggarakan dan memonitor pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). "Tugasnya untuk menjamin bahwa infrastruktur yang dibangun tepat mutu, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat sasaran," ujar Menteri PUPR.

Selain ketiga organisasi baru tersebut, Kementerian PUPR juga membentuk dua Balai baru yakni Balai Prasarana Permukiman Wilayah di 34 Provinsi di bawah pembinaan Ditjen Cipta Karya dan Balai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di bawah pembinaan Ditjen Bina Konstruksi.

Dikatakan Menteri PUPR, Balai Infrastruktur Permukiman ditugasi untuk melaksanakan konsolidasi satker-satker keciptakaryaan, yakni Penataan Bangunan dan Lingkungan/PBL, Penyehatan Lingkungan Permukiman/PLP, Air Minum dan Penataan Kawasan Kumuh) sehingga ke depan lebih terkoordinir, terpadu dan efektif penyelenggaraannya. Sedangkan untuk meningkatkan disiplin dan kualitas PBJ menjadi lebih transparan, bersaing dan akuntabel dibentuk Balai PBJ.



PKO DENGAN BANK NTB SYARIAH UNTUK Mendukung PROGRAM SATU JUTA RUMAH

KEBERHASILAN PROGRAM SATU JUTA RUMAH YANG Mendukung NAWACITA DAN TELAH DITUANGKAN DALAM PERPRES NO. 58/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 3/2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL JUGA TERGANTUNG DARI BAGAIMANA PEMERINTAH MENJALIN KEMITRAAN DENGAN PARA PEMBERI FASILITAS PEMBIAYAAN.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D Heripoerwanto menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara PPDP dengan PT Bank NTB Syariah. Kerjasama tersebut dilakukan untuk penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Pemerintah siap memberikan subsidi kepada 2.000 rumah yang dapat disalurkan Bank NTB Syariah, selama ada rumahnya," kata Eko D. Heripoerwanto setelah acara penandatanganan PKO di NTB, (28/2/2019).

Heri yakin, dengan semangat kemitraan antar berbagai pihak seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha (pengembang), perbankan, dan masyarakat maka penyediaan hunian yang layak, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat lebih cepat terlaksana.

“Melalui program ini diharapkan angka *backlog* akan berkurang dari 7,6 juta menjadi 5,4 juta rumah pada tahun 2019,” terang Heri.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah terhadap Program Satu Juta Rumah, Kementerian PUPR telah memberikan fasilitas dan kemudahan untuk masyarakat khususnya MBR. Dukungan tersebut meliputi pemberian Fasilitas

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB/SSM), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) serta pemberian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk Rumah Sederhana Tapak.

Berbagai fasilitas ini disediakan Pemerintah untuk mempermudah MBR mendapatkan kepemilikan rumah. Sejak 2015 Pemerintah telah memberikan fasilitas rumah subsidi dengan bunga murah atau yang disebut KPR Sejahtera, dengan suku bunga sebesar 5% sepanjang tenor. Fasilitas ini diharapkan akan dapat meringankan beban MBR.

Kerja sama pembiayaan melalui perbankan sudah dilakukan de-

ngan beberapa bank. Pada 2018, BLU PPDPP Kementerian PUPR bekerjasama dengan 43 Bank yang terdiri dari 11 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (konvensional maupun syariah).

“Dalam pelaksanaannya terdapat perubahan porsi pendanaan menjadi 75:25 (Pemerintah dan Bank Pelaksana) berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 463 Tahun 2018. Dalam hal ini Pemerintah juga memberikan skema alternatif pembiayaan ke Bank Pelaksana untuk dapat menggunakan dana dari PT SMF,” pungkash Heri.





MENENGGOK PROGRES TOL SERANG-PANIMBANG

DI DAPUK SEBAGAI SALAH SATU PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN), TOL SERANG-PANIMBANG MENJADI MENJADI SALAH SATU FOKUS UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.



Pentingnya proyek itu tercermin dari upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) saat melakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui progres pembangunannya.

Kunjungan yang dilakukan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto bersama Direktur Utama PT Wijaya Karya Serang Panimbang (WSP) Entus Asnawi Mukhsan tersebut dilakukan untuk meninjau sekaligus mendiskusikan berbagai hal terkait percepatan proyek Tol Serang-Panimbang.

“Jalan tol seksi I sudah mulai dibangun sejak Januari 2018 dan saat ini progres pembangunan sudah mencapai 36,69% per Maret 2019. Kami menargetkan akan rampung di bulan November 2019,” kata Entus di Serang, Rabu (20/03).

Percepatan pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang tersebut dilakukan Pemerintah melalui Kementerian PUPR dengan pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta menggunakan skema Pembiayaan *Supported-Build-Operate-Transfer* (S-BOT).

PT WSP, selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dibentuk oleh konsorsium yang terdiri dari PT Wijaya Karya (porsi saham 80%), PT Pembangunan Perumahan (porsi saham 15%), dan PT Jababeka Infrastruktur (porsi saham 5%).



Terkait jalur, Jalan Tol Serang-Panimbang memiliki total panjang lintasan 83,6 km dan dibagi menjadi tiga seksi, yakni seksi I Serang-Rangkasbitung (26,5 km), Seksi II Rangkasbitung-Cileles (24,1 km), Seksi IIIa Cileles-Bojong (8,6 km), dan Seksi IIIb Bojong-Panimbang (24,4 km).

Dalam pengerjaannya, PT WSP menggarap Seksi I dan Seksi II, sementara Seksi III dikerjakan Pemerintah dengan total nilai investasi sebesar Rp 11,38 triliun.

Di sisi lain, tujuan utama pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang adalah untuk mempermudah akses menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon.

Jalan tol ini diperkirakan mampu memangkas waktu tempuh dari Jakarta menuju Tanjung Lesung yang saat ini memakan waktu sekitar 4-5 jam menjadi sekitar 2-3 jam dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam.

Tidak hanya memangkas waktu tempuh menuju KEK, Jalan Tol Serang-Panimbang juga akan menghubungkan empat kabupaten/kota yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Pembangunan jalan tol ini diharapkan akan mendongkrak ekonomi masyarakat setempat dengan mempersingkat waktu tempuh arus logistik/barang menjadi 2 jam lebih cepat dibanding melewati jalan *non-tol*.



BARU DIBENTUK, DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR LANGSUNG KEBUT KERJA

MESKI BARU DIBENTUK MELALUI PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) PADA AKHIR TAHUN LALU, TIM DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN LANGSUNG BERGERAK CEPAT UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN PUPR.





Gerak cepat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) ini disampaikan Eko D Heripoerwanto saat jumpa pers mingguan dalam rangkaian PUPR Expo 4.0 Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat (8/3).

Dalam kesempatan tersebut, Heri menyampaikan bahwa ia menempatkan orang-orang yang memiliki pengalaman mumpuni di pos-pos tiap direktoratnya.

Selain menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat ini juga siap melanjutkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.

"Kami pastikan bahwa di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, kami menempatkan orang-orang yang dulu paham urusan itu, sehingga tidak perlu belajar lagi," tegasnya.

Secara organisasi, Heri menegaskan bahwa DJPI melibatkan sebagian unit organisasi lain di Kementerian PUPR untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik dan terintegrasi.

Tidak hanya itu, dalam pemaparan di hadapan awak media, Heri sebelumnya juga menyampaikan bahwa perubahan organisasi tidak membuat lepas tanggung jawab terhadap pelaksanaan misi Pemerintah untuk membantu pembiayaan

perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Kenapa kemudian direktorat jenderal ini perlu ada, karena kita melihat bahwa di dalam Visium PUPR 2020 posisi sampai tahun 2024 itu kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur adalah sebesar Rp 2.058 triliun," ujar Heri.

Jumlah kebutuhan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk proyek Sumber Daya Air (Rp 577 triliun), Jalan dan Jembatan (Rp 573 triliun), Infrastruktur Perumahan (Rp 128 triliun), dan Perumahan (Rp 780 triliun).

Heri mengatakan kapasitas posisi proyeksi APBN 2020-2024 baru mencapai Rp 623 triliun atau baru 30 persen dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur.

"Diperlukan pembiayaan non APBN sebesar Rp 1.435 triliun. Inilah yang kami lakukan bersama-sama dengan unit-unit organisasi sektoral untuk memenuhi yang non-APBN sebagai tugas utamanya," imbuhnya.

Dalam pemaparannya, Heri menuturkan bahwa DJPI akan bertugas membantu penyediaan dan pembangunan infrastruktur dengan cara menggandeng investor melalui skema KPBU atau Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

"Intinya sebetulnya KPBU itu mu-

lai dari merencanakan merancang, mendesain, membangun, membiayai, mengoperasikan melalui entitas namanya badan usaha. Beda dengan APBN kita mengenal yang membangun adalah kontraktor," papar Heri mengenai skema KPBU.

Heri mengatakan skema KPBU memberikan manfaat berupa transfer pengetahuan dari swasta ke Pemerintah dan Pemerintah Daerah, alokasi resiko dua belah pihak, baik swasta dan Pemerintah, penyelesaian proyek sesuai dengan kesepakatan yang dapat menghindari siklus anggaran multitahun, serta peluang investasi bagi pihak swasta.

Dulu simpul KPBU ditangani oleh Direktorat Bina Investasi di Ditjen Bina Konstruksi. Sekarang, dilimpahkan ke DJPI melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 379 Tahun 2019. Di Indonesia yang mengurus KPBU hanya Kementerian PUPR di level Direktorat Jenderal.

"Kita berharap dengan cara demikian kita bisa lebih cepat untuk membangun infrastruktur bidang PUPR," imbuhnya.

Untuk 2019, progres KPBU telah mencakup empat tahap, yakni tahap pertama (Perencanaan) di Proyek Batam *sewerage system* (fase 2), kedua (Persiapan) meliputi 12 proyek, ketiga (Transaksi) meliputi delapan proyek, serta keempat (Implementasi/Konstruksi) dengan 1 proyek non-tol dan 33 proyek tol.

EKO D HERIPOERWANTO



“KAMI PASTIKAN BAHWA DI DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN KAMI TEMPATKAN ORANG-ORANG YANG PAHAM URUSAN ITU, SEHINGGA TIDAK PERLU BELAJAR LAGI”

PEJABAT TINGGI PRATAMA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN, KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

IR. IRMA YANTI, MT
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembinaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan
Perumahan





**IR. HERRY TRISAPUTRA
ZUNA, SE, MT**

Direktur Perumusan Kebijakan
dan Evaluasi



**IR. ARVI ARGYANTORO,
MA**

Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Infrastruktur
Sumber Daya Air



RENI AHIANITINI, ST, M.SC

Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Infrastruktur Jalan
dan Jembatan



ADANG SUTARA, SE, M.SI

Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Perumahan



**R. HARYO BEKTI
MARTOYOEDO, ST,
M.SC**

Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Infrastruktur
Permukiman

TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

TUGAS:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

FUNGSI:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi dan layanan investasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
5. Penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
6. Pelaksanaan percepatan kerja sama Pemerintah dan badan usaha bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
7. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
8. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
10. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

MENGENAL EKO D HERIPOERWANTO, NAKHODA DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) ini dibentuk dengan cakupan bidang yang lebih luas serta produk yang lebih banyak. Namun, besarnya cakupan lingkup kerja unit organisasi ini tidak lantas membuat personelnya terbebani. Sang Direktur Jenderal, Eko D Heripoerwanto, justru optimistis terhadap target yang diamanatkan ke unit organisasinya.

Menurut Heri, Tugas Fungsi (Tusi) DJPI sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Ditjen Pembiayaan Perumahan, namun kini ditambah dengan cakupan yang lebih luas.

“Kenapa nomenklaturnya berubah, itu (karena) Pak Menteri minta supaya ada perluasan fungsi yang tadinya hanya pembiayaan perumahan saja menjadi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan,” ujarnya mengenai cakupan tugas DJPI.

KPBU JADI TUGAS UTAMA

Terkait upaya pendanaan untuk mencari sumber-sumber lain di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Non-APBN) melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), Heri mengatakan bahwa pihaknya telah mengupayakan sejumlah langkah.

“Tugas DJPI ini utamanya adalah mencari sumber-sumber pendanaan baru di luar APBN dan/atau APBD,” ungkap Heri. Menurutnya, DJPI yang ia pimpin ditugaskan berupaya mencari sumber-sumber pembiayaan baru di luar APBN.

Salah satu langkah yang sudah DJPI terapkan adalah melakukan pelatihan KPBU secara menyeluruh agar semua pihak di instansinya dapat memahami dan menerapkan alur kerja sistem pembiayaan ini secara baik.

“Sebagian besar personel yang ada di DJPI ini meskipun mengetahui KPBU tapi belum pernah

menanganinya, maka *capacity building* menjadi hal yang utama,” tutur Heri.

Lebih lanjut, Heri mengatakan bahwa jauh sebelum DJPI dibentuk, pegawai-pegawai di lingkungannya telah mengikuti berbagai hal terkait KPBU seperti *focus group discussion* (FGD), seminar serta *workshop* atau diklat. Meski demikian, Heri menambahkan hal itu masih bersifat parsial dan belum sebagai sebuah unit organisasi.

“Sesaat sebelum pelantikan kami mengadakan *workshop* dengan mengundang narasumber dari Bappenas dan Kementerian Keuangan, yang saat itu simpul KPBU di Kementerian PUPR masih dikawal oleh Direktorat Bina Investasi dan Infrastruktur,” lanjut Heri.

Kegiatan itu untuk memaparkan tentang KPBU. Selain itu, DJPI juga menggelar pemaparan dengan mengundang para ahli keuangan dari sejumlah bank ternama serta konsultan yang bertugas di Kementerian Keuangan dan



BIOGRAFI SINGKAT

Nama : Dr. Ir. Eko D. Heripoerwanto, MCP.

Tempat/tanggal lahir: Blitar, 21 Juli 1961.

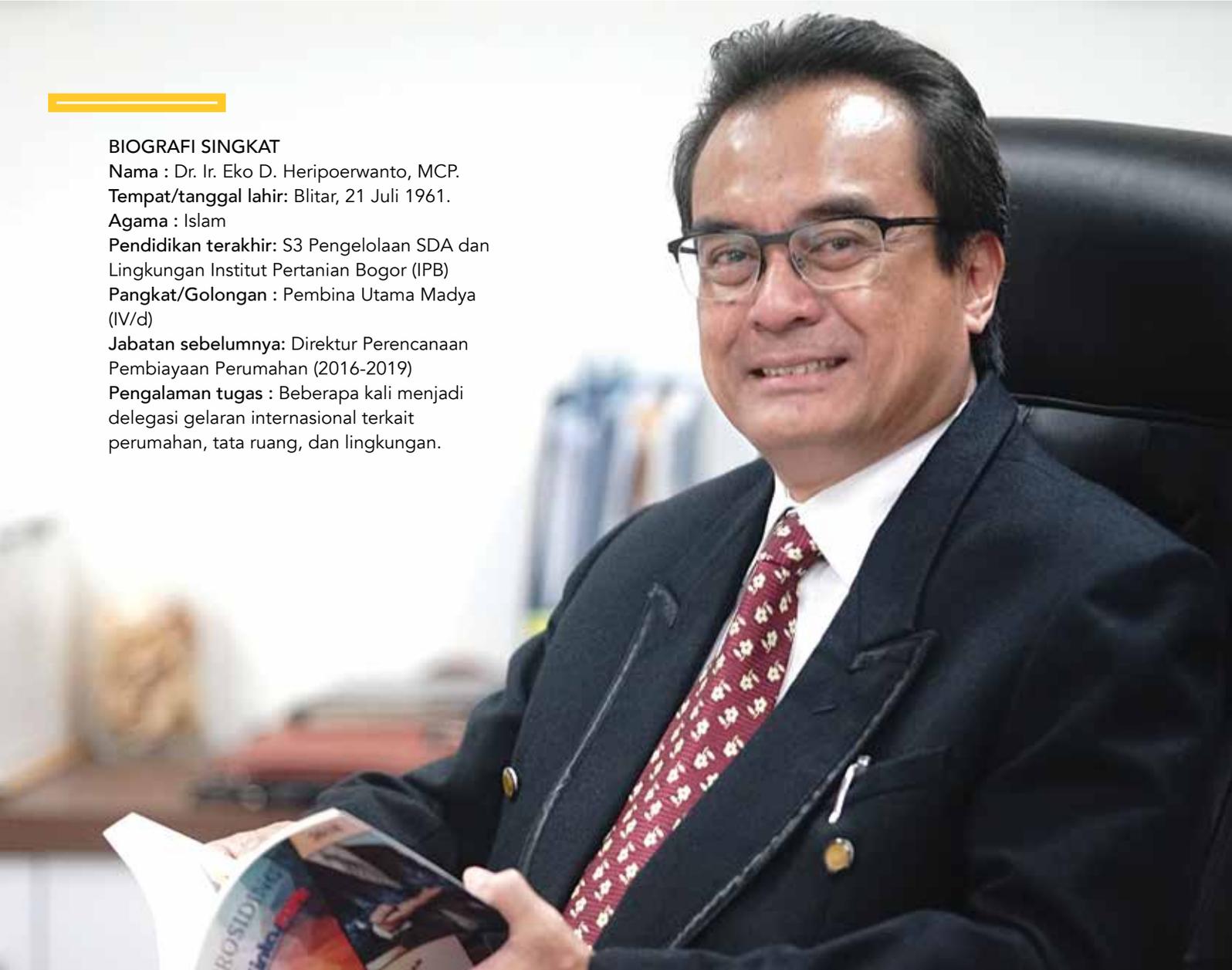
Agama : Islam

Pendidikan terakhir: S3 Pengelolaan SDA dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB)

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan sebelumnya: Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan (2016-2019)

Pengalaman tugas : Beberapa kali menjadi delegasi gelaran internasional terkait perumahan, tata ruang, dan lingkungan.



membantu mempersiapkan KPBU.

Dari segi program pendanaan, untuk menggaet sumber pembiayaan Heri mengatakan bahwa proses KPBU tidak hanya mengandalkan investor lokal. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah bertemu investor internasional saat digelar *Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day* di Singapura bulan lalu.

KINERJA MENYONGSONG ERA 4.0

Bagi Heri, sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan KPBU yang baik juga akan diperkuat

dengan pemahaman dan kemampuan IoT (*Internet of Things*) sejalan dengan langkah Pemerintah untuk menyongsong era 4.0.

“Yang pasti semangatnya adalah *Internet of Things*, dan kita juga ingin melakukan proses bisnis yang dalam tanda petik menuju ke *full automation*. Hal tersebut sudah dimulai sejak beberapa tahun terakhir contohnya di PPDPP yang sudah memiliki e-FLPP dan SIRENG (Sistem Registrasi Pengembang) yang berbasis IT,” ujar Heri.

Lebih lanjut, Heri menggaris-

bawahi bahwa penerapan sistem yang lebih cepat dan terintegrasi juga akan diterapkan di KPBU.

“Proses di KPBU juga ada yang mirip dengan *bidding* dan itu harus dilakukan secara otomatis dan berbasis IT dan tidak bisa menerapkan model lama dan itu yang akan kita dorong karena akan menghemat tenaga dan sumber daya kita dan menjadi lebih cepat,” tambahnya.

SEMUA PROGRAM JADI PRIORITAS

Mengenai program prioritas untuk tahun ini, Heri mengatakan

tidak ada perubahan. Justru ia menuturkan bahwa semua program yang sudah ada dari Ditjen sebelumnya dan program yang akan dikerjakan merupakan program prioritas.

“Yang pasti, terkait sektor perumahan, akan tetap kita jalankan. *Output* yang diminta untuk sektor perumahan tetap kita jalankan di 2019 sembari melakukan transisi untuk organisasi ke depan,” paparnya.

Heri menegaskan bahwa dua program yang dikerjakan tahun ini sama-sama prioritas. “Sifatnya kita mengerjakan dalam tanda petik dua *output*, yang pertama terkait (program) sebelumnya dari Ditjen Pembiayaan Perumahan. Kedua, terkait DJPI ini,” katanya.

BENTUK LINGKUNGAN KERJA MULAI DARI DIRI SENDIRI

Tiga dasawarsa bukan perjalanan singkat bagi Heri di lingkungan kementerian yang kini bernama Kementerian PUPR. Kariernya dimulai sebagai Penata Muda pada 1989 di Ditjen Cipta Karya, Departemen PU dan sempat beberapa kali berpindah posisi sebelum akhirnya dipercaya mengawal visi dan misi DJPI.

Pengalaman itu pula yang menurutnya menjadi guru dalam memimpin, mengarahkan dan menangani sebuah organisasi. “Berdasarkan pengalaman itu, bekerja di organisasi Pemerintah, kemudian memimpin teman-teman, saya mendapat keuntungan (pengalaman) untuk mengelola organisasi, mempercepat proses transformasi dan seterusnya.”

Tidak hanya itu, menurut Heri dalam sebuah organisasi pasti ada hambatan terlebih dalam tim yang melibatkan banyak ang-

gota dengan berbagai latar belakang dan pemikiran. Namun, ia menuturkan hal itu bisa diselesaikan saat semuanya memiliki tujuan bersama yang harus diraih.

“Jika kita bertanya kepada diri sendiri, kita sebenarnya jarang menyukai perubahan. Tetapi begitu saya dan teman-teman di sini mendengar Pak Menteri ingin organisasi ditjen yang lama berubah saya mengatakan kepada teman-teman bahwa kita harus siap,” ungkap Heri mengenai soliditas dan etos kerja yang ia terapkan di DJPI.

“Harus maju, tidak bisa ditawar. Kita di organisasi Pemerintah bertugas menjalankan *policy* dari Pemerintah,” tegasnya mengenai tugas yang diembankan kepada Ditjen yang dipimpinnya. Heri juga mengatakan bahwa jika kita ingin *survive* maka kita harus maju.

Posisi yang saat ini dijabat Heri juga tidak datang dengan sendirinya. Pasang-surut pernah ia lalui sebagai aparatur sipil negara (ASN). Namun, ada hal yang membuatnya terus bertahan yaitu tekad untuk membuktikan diri.

“Tiap-tiap orang mungkin berbeda, dan saya selama masa karier mengalami pasang-surut. Waktu itu ada era di mana setiap tahun nama direktorat jenderal kementerian itu berubah, jadi pengalaman itu memberi saya bekal dan kekuatan untuk menghadapi perubahan dan mencari hikmahnya,” tutur Heri saat mengenang masa kariernya dari Departemen PU, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), dan kini di Kementerian PUPR.

CITA-CITA MEWARISKAN ORGANISASI YANG SOLID UNTUK PENERUS

Layaknya perjalanan, pengabdian Heri juga akan memiliki akhir. Meski demikian ia menuturkan bahwa paling tidak ia dapat mewariskan organisasi yang mapan dan solid bagi siapa pun yang kelak melanjutkannya.

“Saya di sini maksimum hanya 2,5 tahun dan saya akan optimalkan itu. Saya ingin *hand-over* kepemimpinan di sini dalam keadaan organisasi itu sudah bisa lari kencang, diisi oleh (orang-orang) profesional, pekerja keras, dan penuh dedikasi, dan itu jadi tanggung jawab saya,” ujar Heri mengenai target pribadi terhadap DJPI.

“HARUS MAJU, TIDAK BISA DITAWAR. KITA DI ORGANISASI PEMERINTAH BERTUGAS MENJALANKAN POLICY DARI PEMERINTAH,”



DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BISA GERAK CEPAT TANGANI PROYEK INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

PEMBENTUKAN DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AWAL TAHUN INI MEMBUAT BANYAK KALANGAN OPTIMISTIS BAHWA DIREKTORAT JENDERAL BARU INI DAPAT MENGENJOT PROGRAM INFRASTRUKTUR PEMERINTAH DI BAWAH NAUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR).

Oleh: Armand Hermawan, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

“

INI YANG HARUS DIGARIS BAWAHI, BAHWA KPBU BUKAN PRIVATISASI. MAU KONSESINYA 10 TAHUN, 15 TAHUN, 35 TAHUN, CEPAT ATAU LAMBAT ASETNYA HARUS KEMBALI KEPADA PEMERINTAH. MELALUI SKEMA INI PROSES PENGAWASAN JUGA MENJADI LEBIH BAIK, LEBIH TERKOORDINASI DENGAN KPBU, SWASTA YANG MEMBANGUN AKAN LEBIH *COMMIT*.”

Bagi saya, Ditjen baru ini akan membawa banyak manfaat bagi program-program Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui skema KPBU-nya (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha). Dengan adanya Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) bukan hanya menyediakan infrastruktur, tapi juga perumahan melalui KPBU.

Selain itu, skema ini juga menjadi solusi keterbatasan anggaran infrastruktur Pemerintah yang sebelumnya berasal dari APBN dan/atau APBD. KPBU ini sangat penting karena penyediaan infrastruktur tidak lagi bersumber dari anggaran Pemerintah.

Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah proyek tol Batang-Semarang di mana investor yang menggalang pendanaan, membangun, dan mengoperasikan dalam periode konsesi 35 tahun tanpa membebani anggaran Pemerintah. Dengan KPBU, Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan saja.

Dengan begitu, Pemerintah tidak perlu direpotkan dengan proses penggalangan dana,

penerbitan obligasi negara, atau pembayaran bunga untuk pembangunan infrastruktur. Terkait minimnya informasi serta kekhawatiran sebagian pihak mengenai skema ini, saya tegasakan bahwa KPBU bukan merupakan privatisasi infrastruktur.

Ini yang harus digaris bawahi, bahwa KPBU bukan privatisasi. Mau konsesinya 10 tahun, 15 tahun, 35 tahun, cepat atau lambat asetnya harus kembali kepada Pemerintah. Melalui skema ini proses pengawasan juga menjadi lebih baik, lebih terkoordinasi, dan swasta yang membangun akan lebih *commit*.

Nantinya, pihak yang memantau proyek KPBU bisa dari peminjam, Kementerian PUPR, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Kami juga akan memastikan bahwa proyek tersebut tidak akan mangkrak karena koordinasi pengawasan akan lebih ketat dan transparan.

Tidak hanya dalam proses konstruksi dan operasi, bahkan sejak tahap pengadaan, skema ini juga sudah transparan karena berpedoman pada Perpres 38 Tahun 2015. Sementara mengenai proyek KPBU yang akan dijalankan, Armand mengatakan tidak ada kendala karena proyek-proyek infrastruktur beri-

kutnya hanya mereplikasi proyek yang telah atau sudah berjalan. Bahkan pihaknya di Penjaminan Infrastruktur Indonesia sejauh ini telah menjamin 22 proyek.

Soal sumber daya manusia, saya juga tidak memiliki kekhawatiran. Saya meyakini bahwa tim di Kementerian PUPR yang ditunjuk untuk bertugas di DJPI dan menangani skema ini adalah orang yang tepat dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan tugas ini.

Saat ini mungkin belum *familiar* saja. Selama ini kan teman-teman Kementerian PUPR terbiasa dengan APBN. Jadi hanya perlu terbiasa saja mengenai skema ini. Kalau mengenai *knowledge* dan *sharing*-nya tidak begitu sulit. Saya juga yakin bahwa hanya dengan tiga sampai empat kali menangani skema ini mereka dapat dengan sigap menangani proyek-proyek berikutnya.

Selain itu, saya juga memiliki keyakinan dan optimis bila unit baru ini mampu bergerak cepat. Saya percaya Pak Dirjen, komitmennya sangat kuat dan juga sangat suportif dalam penyediaan infrastruktur melalui KPBU.

Terakhir, saya percaya DJPI mampu meningkatkan pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan lebih cepat lagi.



MENELUSURI KAMPUNG WARNA WARNI DAN MUSEUM ANGKUT

KOTA MALANG ADALAH SEBUAH KOTA YANG TERLETAK DI PROVINSI JAWA TIMUR, INDONESIA DAN MENJADI KOTA TERBESAR KEDUA DI JAWA TIMUR SETELAH SURABAYA. BEBERAPA SEBUTAN KOTA MALANG YAITU KOTA PENDIDIKAN, KOTA PARIWISATA, KOTA BUNGA DAN KOTA SENI DENGAN BANYAKNYA KESENIAN KHAS DARI KOTA INI, MULAI DARI TARIAN HINGGA PERTUNJUKAN. BERKESEMPATAN MENJELAJAH KE KOTA MALANG, SAYA MENUJU DUA KAWASAN WISATA YAITU KAMPUNG WARNA WARNI DAN MUSEUM ANGKUT.



Kawasan Kampung Warna Warni atau Kampung Pelangi Jodipan terletak di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Sebelum menjadi destinasi wisata, Kampung Pelangi Jodipan merupakan kampung kumuh di pinggir Kali Brantas.

Tahun 2016, kampung tersebut disulap menjadi Kampung Warna Warni dan menjadi salah satu kampung wisata di Malang yang didatangi ratusan wisatawan tiap minggunya. Tiket masuk kampung ini cuma Rp 2.000 dan kita diberikan cinderamata unik berupa stiker ataupun gantungan kunci yang dibuat oleh warga Kampung Warna Warni. Di Kampung Warna Warni ini terdapat banyak spot-spot menarik untuk dijadikan latar *selfie* yang *instagramable*.

Berikut beberapa hal menarik di Kampung Warna Warni atau Kampung Pelangi Jodipan.

- Lorong Payung adalah lorong-lorong yang berada di depan rumah-rumah warga yang dihias dengan payung warna warna yang digantung di atas. Selain membuat teduh, kita bisa berfoto di bawah payung-payung yang seperti terbang di udara.
- Lukisan 3D, menjadi *spot selfie* dengan berbagai macam





lukisan seperti gorila, ikan hiu dll.

- Dinding Warna Warni, dinding rumah warga dicat warna warni dengan mural-mural yang juga dapat menjadi latar foto *selfie*.
- Tangga Warna Warni, karena permukaan jalan di Kampung Pelangi ini tidak rata jadi ada banyak anak tangga di tengah kampung. Berfoto di atas anak tangga yang warna warni pastinya keren.
- Jembatan Kaca, adalah jembatan dengan lantai kaca yang dibuat mirip jembatan gantung yang ada di Tiongkok. Walaupun ukurannya kecil, tapi jembatan kaca ini dapat dijadikan lokasi foto. Selain itu juga berfungsi sebagai penghubung antara Kampung Warna Warni dan Kampung 3D.

WISATA MUSEUM ANGKUT

Belum lengkap wisata kita kalau belum ke Museum Angkut yang berada di Kota Batu. Muse-

um Angkut ini menyajikan konsep wisata yang berbeda dari umumnya tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia yaitu objek wisata transportasi. Hebatnya, museum ini tercatat sebagai museum transportasi pertama yang ada di Asia sejak dibuka pada 9 Maret 2014. Unik, ya.

Museum ini memamerkan sarana transportasi yang ada di Indonesia dan dari negara-negara lain. Koleksinya mencapai 300 mobil. Dari yang paling antik (kuno) sampai yang terbaru (modern). Dari transportasi yang digerakkan oleh tenaga manusia dan hewan, hingga transportasi yang digerakkan oleh mesin.

Berikut harga tiket Museum Angkut di Batu :

- Hari Senin-Kamis (hari kerja): Rp 70.000,-
- Hari Jumat-Minggu (akhir pekan) : Rp 100.000,-

Tiket tersebut sudah termasuk masuk ke dalam wahana D'Topeing dan juga Runway 27 yang ada di dalam Museum Angkut Batu.

Jam operasional dari Museum Angkut Batu : 12.00 – 20.00 WIB

Ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang biaya tambahan yang ada di Museum Angkut di Batu :

- Tinggi badan 85 cm ke atas akan dikenakan pembayaran tiket penuh.
- Kita harus membayar tiket kamera jika membawa kamera berjenis Polaroid, DSLR, Kamera Digital, *Handy-cam*, dan sejenisnya. Perkecualian adalah *smartphone*.
- Kita bisa membeli tiket terusan untuk yang ingin mencoba seluruh tempat wisata yang berada di bawah Jawa Timur Group.
- Tiket Sakti dari Jawa Timur Group: Paket Sakti (berlaku 2 hari) : Rp 375.000 dan Paket Super Sakti (berlaku 3 hari) : Rp 450.000.

Tiket tersebut akan berlaku untuk masuk ke Jatipark 1, Museum Satwa Batu Secret Zoo, Eco Green Park, Predator Fun, Museum Tubuh, Museum Angkut dan Batu Night Spectacular. (ind)



SUBSIDI BUNGA KREDIT PERUMAHAN

T: Salam hormat untuk redaksi Majalah Vfm. Perkenalkan nama saya Rudi Syahrizal, saya berusia 33 tahun dan bekerja sebagai wiraswasta. Saya pernah mendengar terkait subsidi bunga kredit perumahan. Dari beberapa orang yang saya tanya, jawaban mereka selalu berbeda-beda. Pertanyaan saya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan subsidi bunga kredit perumahan? Atas jawabannya saya haturkan terima kasih.

Rudi Syahrizal – Semarang

J: Salam kenal untuk Bapak Rudi Syahrizal. Semoga Anda selalu sehat dan berbahagia. Kami langsung menjawab pertanyaan dari Anda. Subsidi bunga kredit perumahan adalah subsidi Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah berupa selisih suku bunga / marjin antara kredit / pembiayaan pemilikan rumah yang menggunakan suku bunga komersial dengan suku bunga / marjin kredit / pembiayaan pemilikan rumah yang dibayar oleh debitur / nasabah ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian semoga pertanyaan Anda bisa terjawab.

APA ITU KPBU?

T: Assalamualaikum Wr Wb. Belakangan saya sering mendengar istilah KPBU dalam pembangunan infrastruktur. Apa yang dimaksud KPBU? Terima kasih.

Intan – Depok, Jawa Barat

J: Salam kenal untuk Ibu Intan. KPBU merupakan kepanjangan dari Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha. Badan usaha yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi. (Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015, LKPP No. 19 Tahun 2015).

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.



PERBEDAAN MANFAAT PROGRAM FLPP DAN SSB UNTUK MBR

T: Saya ingin bertanya. Saya kerap mendengar istilah FLPP dan SSB. Sebetulnya, apa perbedaannya? Lalu apa perbedaan manfaat program FLPP dan SSB bagi orang-orang dengan kategori MBR seperti saya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.

Dian Renggani – Cirebon

J: Salam kenal untuk Ibu Dian, semoga Ibu selalu berbahagia. Sebetulnya tidak ada perbedaan manfaat yang diterima MBR baik menggunakan skema FLPP maupun Subsidi Bunga Kredit Perumahan. Manfaat yang diterima adalah KPR dengan suku bunga 5% per tahun (efektif atau anuitas) sepanjang masa pinjaman atau paling lama 20 tahun.

Begitu kira-kira jawabannya. Semoga dapat dipahami.



Menteri PUPR sedang meninjau booth pameran PUPR 4.0 Expo, Senin (11/2) bertempat di ruang serbaguna Kementerian PUPR, Jakarta.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko. D Heripoerwanto memberikan sambutan pada saat membuka acara *Talkshow* KPBU dalam rangkaian acara PUPR 4.0 Expo, Selasa (5/3) bertempat di Ruang Serbaguna Kementerian PUPR, Jakarta.



Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko. D Heripoerwanto menjadi narasumber bersama Dirjen Penyediaan Perumahan, Khalawi AM dan Direktur Utama PPDP, Budi Hartono pada acara Jumpa Pers dalam rangkaian PUPR 4.0 Expo, Jumat (8/3) bertempat di ruang serbaguna Kementerian PUPR, Jakarta.



Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko. D Heripoerwanto menjadi Narasumber dalam acara *Workshop* Bangunan *Precast* Mendukung Pembangunan Berorientasi *Transportation Oriented Development (TOD)*, Jumat (22/3) bertempat di ICE BSD, Tangerang Selatan.



Menteri PUPR didampingi Sekjen Kementerian PUPR, dan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR melaksanakan Rapat Pimpinan dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan beserta jajarannya, Selasa (12/2) bertempat di ruang rapat DJPI, Jakarta.



Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko. D Heripoerwanto memberikan sambutan pada acara Penandatanganan 146 PKS antara Bank Negara Indonesia (BNI) dengan pengembang dan akad kredit massal dengan 1.946 debitur BNI, Sabtu (23/3) di Surabaya.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko. D Heripoerwanto berbincang dengan debitur pada acara Penandatanganan 146 PKS antara Bank Negara Indonesia (BNI) dengan pengembang dan akad kredit massal dengan 1.946 debitur BNI, Sabtu (23/3) di Surabaya.



Pelantikan Pejabat Pengawas di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Senin (11/3) bertempat di Ruang Pendopo, Kementerian PUPR, Jakarta.



Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Adang Sutara, memberikan sambutan pada acara Pencatatan Obligasi PUB IV Tahap VIII Tahun 2019, Senin (25/3) bertempat di Gedung Bursa Efek Jakarta.



PERUBAHAN NOMENKLATUR, BERIKUT TUGAS DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Kebutuhan akan ketersediaan pembiayaan infrastruktur untuk menunjang percepatan penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan, dinilai sangat perlu untuk melakukan penguatan dan revitalisasi organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Atas pertimbangan tersebut, pada 20 Desember 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto ditemui di ruang kerjanya, (18/2) mengatakan, "tugas Direktorat Jenderal tersebut yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum pada Perpres Pasal 24."

KEMBANGKAN INOVASI PEMBIAYAAN DENGAN MENGGANDENG SWASTA

Direktur Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Arvi Argyantoro dan Sesditjen Pembiayaan Perumahan Irma Yanti menerima kunjungan Direktur Utama PT Anglo Euro Energi Indonesia, Alan Lau Yew Ghee, Kamis (31/1). Pertemuan tersebut membahas mengenai *Innovative Financing & Public Private Partnerships In Housing Program Acceleration*.

Arvi Argyantoro menyampaikan ketertarikannya untuk menggunakan skema pemberdayaan masyarakat melalui *People First Project Private Partnership* (PF-PPP) sebagai strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dan juga berbagi metode mekanisme pembiayaan proyek Infrastruktur yang efektif dan efisien.



PUPR Segera Selesaikan Skema Pembiayaan Rumah ASN, TNI, dan Polri

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan akan mengubah Peraturan Menteri PUPR NO. 21/PRT/M/2016 juncto Peraturan Menteri PUPR NO. 26/PRT/M/2016, Kepmen PUPR NO. 552/KPTS/M/2016. Hal itu terkait rencana Pemerintah memberikan subsidi pembiayaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat bersama Wakil Presiden Jusuf

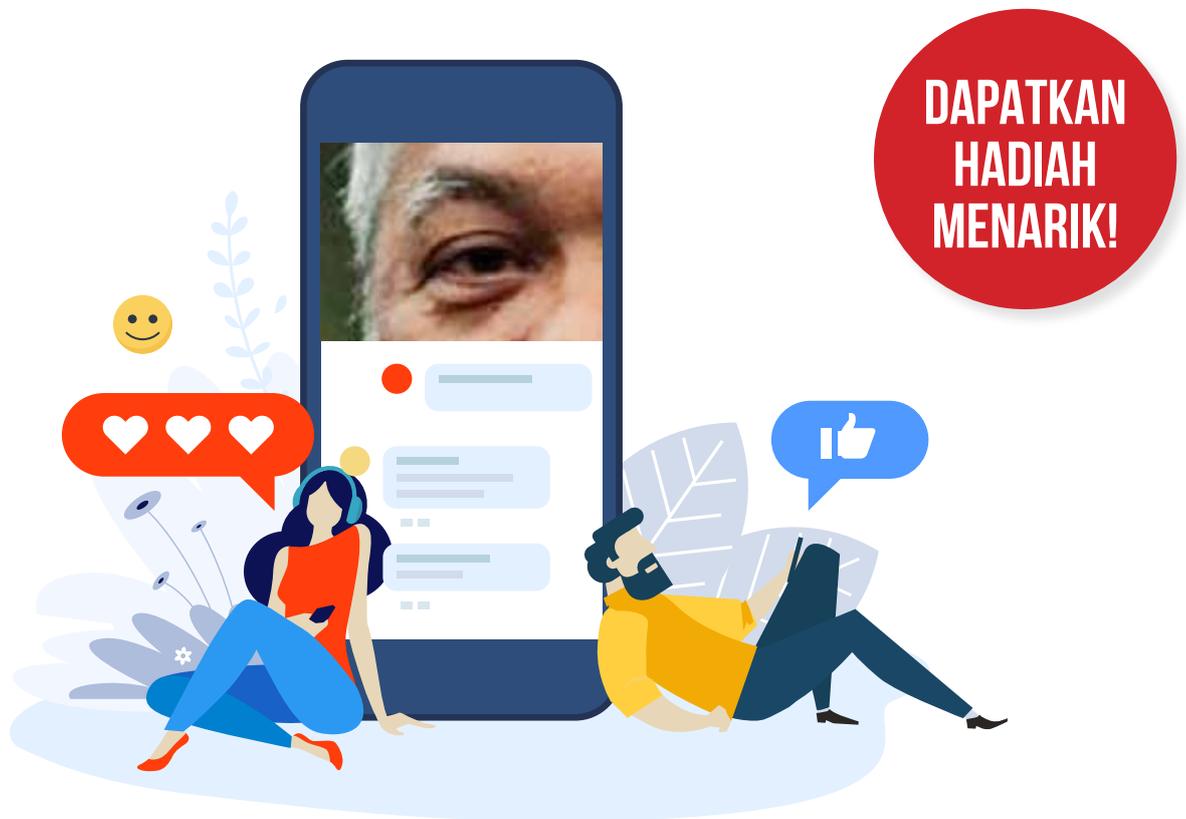
Kalla di Jakarta, Kamis (21/2). Menurut Basuki, dengan perubahan peraturan tersebut, nantinya ASN sampai dengan golongan III, TNI, dan Polri dapat mengajukan pembiayaan rumah subsidi dengan batasan penghasilan menjadi Rp 8 juta. Dalam aturan sebelumnya, ditetapkan batasan penghasilan untuk subsidi adalah penghasilan maksimal sebesar Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun.



TEBAK TOKOH

ANDA TAHU SOSOK DI FOTO INI? BILA IYA, YUK IKUTAN KUIS MAJALAH VfM. CARANYA GAMPANG, IKUTI LANGKAH-LANGKAH DI BAWAH INI.

1. Foto halaman kuis ini dan unggah di Instagram Anda, sertakan jawabannya
2. Sertakan tagar **#KuisMajalahValueforMoney** **#PembiayaanInfrastruktur**
3. Mention ke Instagram DJPI **@Pembiayaan_Infrastruktur**
4. Follow Instagram DJPI **@Pembiayaan_Infrastruktur**
5. Jawaban kuis paling lambat kami terima tanggal 5 Juni 2019
6. Pemenang akan diumumkan di Majalah VfM edisi berikutnya



SELAMAT UNTUK PARA PEMENANG KUIS MAJALAH GRHA EDISI SEPTEMBER - DESEMBER 2018



Mochamad
Thariq



Akhmad Reza
Pahlevi



Yessi Fianti



Aditya



Dede Sulaiman

Hadiah dapat diambil di Redaksi Majalah VfM,
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

رَمَضَانَ
كَرِيمًا

Matahari berzikir
Angin bertasbih
Pepohonan memuji keagungan-Mu
Semua bergembira menyambut Ramadan
Mohon dibukakan pintu maaf



**SELAMAT MENUNAIKAN
IBADAH PUASA**

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan



pembiayaan.pu.go.id



PembiayaanInfrastruktur



@Pembiayaan_Infrastruktur



Pembiayaan Infrastruktur PUPR



@Pemb_InfraPUPR